

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Umumnya, metode atau cara yang salah satunya dipakai untuk menentukan beberapa orang yang akan ditugaskan untuk menjadi perwakilan rakyat dan yang nantinya akan menjadi pemimpin dalam melaksanakan tugas yang berhubungan dengan pemerintahan yaitu dengan diselenggarakannya pemilihan umum (pemilu). Pemilihan umum merupakan suatu proses memberikan suara untuk menentukan orang yang dipilih untuk menduduki beberapa jabatan politik tertentu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilakukan dengan berdasar asas pemilu yaitu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luberjurdil). Beberapa jabatan yang ditentukan melalui pemilu dari presiden, DPR untuk berbagai wilayah pemerintahan bahkan sampai dengan kepala desa.<sup>1</sup>

Pemilu juga merupakan satu dari beberapa elemen dalam sistem demokrasi yang secara konseptual sebagai suatu sarana dalam implementasi yang berasal dari kedaulatan rakyat. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya salah satu tolok ukur akan keberhasilan pada elemen demokratis yaitu melalui terlaksanakannya pemilihan umum yang teratur, bebas, tanpa adanya unsur paksaan serta jauh dari tindakan represif yang berasal dari pihak yang berkepentingan.

Penyelenggaraan pemilu termasuk Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada pada dasarnya ialah bagian terpenting dalam suatu kehidupan bernegara di Indonesia sejak era reformasi. Pilkada dalam penyelenggaraannya dilakukan sejalan dengan politik yang semakin berkembang yang selalu dilaksanakan semenjak masa reformasi seperti pada tahun 2005 di Indonesia dikondisikan sebagai suatu prosedur demokratis baru yang dijadikan dalam rangka untuk mengganti serta mengisi jabatan kepala daerah, disamping itu juga secara konseptual disebut dengan “Pilkada” yang sehingga melalui Pilkada penduduk di suatu daerah dapat dengan bebas serta merdeka dalam memberi dukungan kepada satu orang yang mereka setuju untuk mengemban tugas sebagai kepala daerah yang tentunya

---

<sup>1</sup> Fajilurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Kencana, 2018), 1.

berdasarkan pada bermacam aspirasi dan pastinya dengan pemikiran rasional masing-masing orang.<sup>2</sup> Terselenggaranya Pilkada yaitu setiap lima tahun sekali. Sebagaimana agenda tersebut pun dilaksanakan mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga kotamadya.

Penelitian ini peneliti berfokus pada Pilkada di Daerah Santri yaitu di kabupaten Kudus yang mana kabupaten Kudus itu sendiri merupakan salah satu kota yang mendapatkan julukan sebagai Kota Santri. Adapun santri itu sendiri ialah salah satu dari trikotomi yang dalam pandangan Geertz terdiri dari abangan, santri, dan priyayi. Geertz memaknai istilah santri dalam makna yang lebih luas daripada sekadar murid dan lulusan pesantren; yang dimaksudkan bahwa semua orang Islam yang kesehariannya itu menjalankan lima rukun Islam, dan sedangkan istilah pada sebelumnya lebih biasa dipakai ialah putihan,<sup>3</sup> dalam pandangan lain kelompok santri juga diasosiasikan dengan Islam yang murni.<sup>4</sup>

Sedangkan Kota Santri merupakan julukan yang disematkan pada kota dengan kriteria terdapatnya banyak pondok pesantren, contoh kota yang mendapat julukan kota santri di antaranya Jombang, Lamongan, Situbondo, Gresik, Kudus. Sebagaimana berdasarkan dari beberapa contoh dari kota santri tersebut, salah satu kota santri yang menjadi lokasi penelitian ini yaitu di Kota Kudus.<sup>5</sup> Dengan demikian santri juga dapat diartikan sebagai sebutan bagi murid yang berada di pesantren yang mendalami Islam di pondok pesantren.

Kota Kudus ialah kota kabupaten yang masuk dalam wilayah provinsi di Jawa Tengah. Kabupaten Kudus memiliki wilayah dengan batas sebelah timur Kabupaten Pati, batas sebelah selatan dengan kabupaten Grobogan dan Demak, serta batas sebelah barat dengan kabupaten Jepara. Kabupaten Kudus

---

<sup>2</sup> Idil Akbar, "Pilkada Serentak Dan Geliat Dinamika Politik Dan Pemerintahan Lokal Indonesia," *CosmoGov2*, no.1(2017), [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=pilkada+serentak+dan+geliat+dinamika+politik+&oq=pilkad](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pilkada+serentak+dan+geliat+dinamika+politik+&oq=pilkad).

<sup>3</sup> Amanah Nurish, *Agama Jawa Setengah Abad Pasca-Clifford Geertz* (Yogyakarta: LKiS, 2019).

<sup>4</sup> Bambang Pranowo, *Memahami Islam Jawa* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011), 8.

<sup>5</sup> "Kota Santri", [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_santri](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_santri). diakses pada tanggal 28 Juli, 2020, pukul 23.00 WIB.

mempunyai sembilan kecamatan dengan pembagian dalam 123 desa dengan 9 kelurahan.<sup>6</sup> Di masa abad pertengahan kota Kudus berperan sebagai pusat berkembangnya agama Islam, buktinya ialah dengan adanya 2 makam wali/sunan besar Jawa, yaitu Sunan Kudus dan Sunan Muria sehingga hal ini juga menjadikan Kudus kental akan nuansa religiusnya.

Di sisi lain dalam aspek sosial,<sup>7</sup> Kudus ialah kota yang berdiri dibagian utara Jawa Tengah yang termasuk area pedalaman dengan wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah-wilayah dataran rendah. Kontur wilayah yang ada di kota Kudus dengan karakter tanah datar dan hawa panas (sejuk), ini menjadikan lahannya cocok untuk dimanfaatkan sebagai tempat bercocok tanam untuk jenis tanaman pangan. Di samping itu dengan adanya pengaruh kuat agama Islam di Kudus memungkinkan terbentuknya jiwa dagang masyarakat dan potensi pasar disana. Di area pedesaan banyak penduduk yang berprofesi sebagai petani dengan memanfaatkan lahannya untuk bercocok tanam jenis tanaman pangan dan tebu sedangkan untuk penduduk di wilayah Kudus Kulon dan Kudus Kota kebanyakan berprofesi sebagai pedagang karena adanya pengaruh jiwa Islam yang kental. Pembangunan daerah sangat erat kaitannya dengan peran masyarakat yang sejalan dengan keadaan SDA dan SDM serta potensinya masing-masing yang ada di daerah itu.

Terdapat beragam etnis dan keturunan yang berdiam di wilayah Kudus, diantaranya penduduk pribumi, bangsa Arab, dan etnis Tionghoa. Penduduk disana mayoritas meyakini Islam sebagai agama yang dianut. Bagi masyarakat etnis Tionghoa, wilayah yang ditempati lebih banyak di area perkotaannya seperti wilayah; Kramat, Panjunan, Wergu, Demaan. Sedangkan untuk etnis keturunan Arab banyak yang tinggal diwilayah dekat atau sekitaran area kompleks Sunan Kudus dan untuk penduduk pribumi sendiri telah tinggal dan menyebar ke segala penjuru kota Kudus. Dilihat dari latar belakang dulunya masyarakat Kudus mayoritas berprofesi sebagai pedagang, petani, perajin, atau petugas agama. Untuk masyarakat dengan profesi pedagang, kegiatan yang dilakukan dengan ialah menjual barang dagangannya ke berbagai daerah lalu setelah semua laku terjual,

---

<sup>6</sup> “Kecamatan di Kabupaten Kudus”, BPS Kabupaten Kudus, diakses pada tanggal 29 Juli, 2020, pukul 13.00 WIB.

<sup>7</sup> Lance Castle, *Tingkah Laku Agama, Politik Dan Ekonomi Di Jawa: Industri Rokok Kudus* (Jakarta: Sinar Harapan, 1982), 82-83.

pedagang tersebut kembali lagi untuk membeli barang dan kemudian menjualnya lagi. Sektor perdagangan dapat dikatakan sebagai satu dari sumber penting penggerak dan pendorong kesejahteraan di kota Kudus hingga kemudian ada pembangunan industri rokok kretek Kudus<sup>8</sup>.

Adanya pertumbuhan penduduk yang cepat di Kudus membuat semua aspek masyarakat dan pemerintah bekerja bersama demi mewujudkan cara untuk terus bisa memberikan jaminan kesejahteraan masyarakat secara merata. Apabila satu sektor berubah hal ini akan berdampak pada sektor lainnya seperti terjadi peningkatan yang tidak seimbang antara jumlah wanita dan laki-laki sehingga hal ini mengakibatkan wilayah pertanian semakin sempit, sebagai cara untuk mengatasinya maka dibuat satu sektor di luar pertanian yaitu industri dan pada hal ini untuk para wanita guna mengatasi penyempitan lahan pertanian dan mendorong kesejahteraan maka mereka bekerja dalam sektor industri rokok kretek Kudus. Hal ini terjadi karena pada industri rokok buruh wanita dibutuhkan lebih banyak, dengan alasan untuk proses produksinya dibutuhkan pengerjaan dengan kesabaran, ketelitian, keuletan, dan kerapian. Dengan demikian para wanita di Kudus juga memegang peran dalam mendongkrak perekonomian di Kudus dengan adanya dominasi buruh di sektor industri rokok kretek Kudus.

Di dalam budaya patriaki tidak jarang peran wanita dipandang sebelah mata karena adanya anggapan bahwa wanita itu adalah makhluk lemah. Dengan adanya anggapan tersebut maka wanita kurang diminati untuk dijadikan sebagai wakil rakyat atau calon lain yang dapat menduduki jabatan tertentu baik itu di tingkat kabupaten, daerah, atau pun bahkan di tingkat provinsi. Di sisi lain seringkali terdapat berbagai macam kendala serta permasalahan yang menghambat akan gerak perempuan dalam berpartisipasi di ranah politik,<sup>9</sup> contoh saja di salah satu kota santri yaitu di Jombang yang meskipun memiliki kultur pesantren dimana dalam kultur pesantren itu sendiri tidak terlepas dari konsep patriarki yang memberikan gambaran bagaimana

---

<sup>8</sup> Lance Castle, *Tingkah Laku Agama, Politik dan Ekonomi di Jawa*

:

*Industri Rokok Kudus* (Jakarta : Sinar Harapan, 1982), 82-83.

<sup>9</sup> Yahya Ahmadi, *Pandangan Masyarakat pada Calon Anggota Legislatif (CALEG) Perempuan PPP di Daerah Pemilihan (DAPIL) I Kabupaten Gresik* (2019): 4-5.

laki-laki memiliki kekuasaan yang umumnya meliputi segala struktur kehidupan masyarakat. Dengan demikian bisa diartikan bahwa perempuan berkedudukan di bawah laki-laki. Sementara dalam ranah politik juga seringkali adanya anggapan bahwasanya dunia politik adalah dunianya laki-laki yang sehingga anggapan seperti itulah menyebabkan rendahnya akan keterwakilan perempuan di dunia politik. Ironisnya pun seakan akan perempuan hanya sebagai pekerja domestik saja, padahal anggapan seperti itu justru kurang tepat dikarenakan dalam rangka untuk membangun negara yang maju juga diperlukan peranan dari perempuan yang bertujuan untuk membantu dalam perkembangan baik itu pada perekonomian negara dan lain sebagainya tersebut tentu sangatlah dibutuhkan akan peran perempuan di ranah politik juga.

Masa kini, sebagai upaya yang paling berpotensi untuk dapat mengangkat posisi perempuan untuk ikut berperan dalam posisi pengambil keputusan ialah melalui *affirmative action*. Cara ini ialah satu alat yang penting yang setidaknya dapat mempertahankan sekitar 30 persen perempuan supaya tetap dapat mengemban tugas pada posisi pembuatan keputusan sedangkan dalam arti lain dapat didefinisikan sebagai peraturan dan tindakan sah untuk mendapatkan pengakuan untuk kesetaraan gender.

Pada hal dalam catatan sejarah telah tercatat bahwa perempuan Indonesia pernah menjadi pimpinan tertinggi pemerintahan. Contoh saja representasi politik perempuan nasional dalam lembaga eksekutif, Presiden Megawati Setyawati Soekarno putri merupakan seorang perempuan pertama yang menjabat sebagai presiden atau kepala negara di Indonesia dalam periode waktu sekitar lebih dari 3 tahun (23 Juli 2001—20 Oktober 2004). Setelah jatuhnya masa Orde Baru (Orba), pada pelaksanaan pertama kalinya pemilu legislatif demokratis, Partai Demokrasi Indonesia–Perjuangan di bawah pimpinan Megawati Soekarno Putri dapat memenangkan 30 persen suara lebih pada perayaan pemilu tersebut. Dalam contoh perjalanan karir berpolitik ini dapat dikatakan sebagai prestasi perempuan untuk segi eksekutif yang kemudian menjadi salah satu barometer perkembangan kualitas berpolitik perempuan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Ella Syafputri, “Keterwakilan Perempuan di Parlemen: Komparasi Indonesia dan Korea Selatan,” *IJIS* Vol.1, No.2, Desember 2014, diakses pada tanggal 28 September, 2020 pukul 13.00 WIB.

Tabel 1.1.  
 Anggota DPR RI per Partai Politik Berdasarkan Jenis  
 Kelamin

Jumlah Anggota DPR RI per Partai Politik Berdasarkan Jenis Kelamin	2009-2014		2014-2019	
	Laki- laki	Perempuan	Laki- laki	Perempuan
Nasdem	0	0	31	4
PKB	21	7	37	10
PKS	54	3	39	1
PDIP	77	17	88	21
Golkar	88	18	75	16
Gerindra	22	4	62	11
Demokrat	113	35	48	13
PAN	39	7	40	9
PPP	33	5	29	10
Hanura	14	3	14	2

Sumber: [www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)

Di sisi lain jika dilihat dengan berdasarkan dari tabel representasi politik perempuan di ranah legislatif pada periode 2014-2019 justru menunjukkan bahwa anggota DPR perempuan yang terpilih dalam setiap fraksi tersebut presentase perempuan belum mencapai kuota 30 persen jika dibandingkan dengan presentase laki-laki. Anggota DPR perempuan dalam dua periode dengan jumlah terendah yaitu di partai PKS. Pada rentang tahun mulai 2009-2014, perwakilan politik perempuan dari partai PKS tersebut hanyalah 5,26 persen dari total jumlah anggota DPR dari PKS. Sedangkan, untuk periode 2014-2019, perwakilan politik perempuan mejadi turun 2,5 persen dari jumlah total anggota PKS menduduki kursi DPR. Adanya penurunan ini kemungkinan besar karena terjadinya hambatan pada calon legislatif perempuan pada saat pemilihan umum. Di antara hambatan tersebut bisa seperti adanya budaya patriarki yang masih kuat sehingga sering terjadi diskriminasi perempuan dalam konteks adanya anggapan terhadap perempuan dimana tanggung jawab ganda yang ditanggungnya baik dalam ranah privat atau publik dan juga pandangan yang menganggap bahwa kemampuan politik dan pendidikan yang dimiliki perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Jabatan perwakilan rakyat untuk perempuan ini haruslah jadi perhatian tersendiri dari pemerintah karena ikut sertanya perempuan akan bisa memberi kesempatan

dan otoritas sebagai penentu keputusan dan pembuat kebijakan dimana ini akan sangat membantu dalam pencapaian hak-hak perempuan, yang terpenting mengenai kesetaraan gender.<sup>11</sup>

Akan tetapi meskipun di ranah legislatif tersebut belum mencapai kuota 30 persen peran pemimpin perempuan, pencapaian peran perempuan di tingkat eksekutif terutama yang dipimpin oleh perempuan mampu membuktikan bahwa pemimpin perempuan memiliki kualitas yang membawa perubahan yang bagus. Hal itu dibuktikan dengan di antaranya seperti terpilihnya jabatan Walikota Surabaya yang diduduki oleh perempuan pertama kalinya pada 2010-2015 menggantikan Bambang DH. Tri Rismaharini yang kerap mendapat sapaan sebagai Bu Risma telah menunjukkan prestasinya melalui pengelolaan pertanaman Surabaya yang sebagai contohnya seperti Taman Bungkul yang pada awalnya tidak pantas jika disebut sebagai taman namun pada akhirnya mampu disulap menjadi lebih indah serta sudah mendapat pengakuan dunia sehingga mendapat penghargaan sebagai taman terbesar se-Asia Tenggara. Dan tak hanya itu saja, prestasi yang lainnya juga seperti keberhasilan beliau dalam pemangkasan anggaran birokrasi yang tidak jelas, lalu adanya program bantuan keringanan kesehatan khususnya untuk warga yang kekurangan secara ekonomi sekaligus mampu memberikan tambahan dana pendidikan sebesar 35% dari APBD sebagaimana persentasinya jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan anggaran pendidikan nasional. Oleh karena itulah melalui prestasi-prestasinya, Bu Risma berhasil dan dinominasikan sebagai Walikota terbaik di dunia 2012 dengan nama anugerahnya *World Mayor Prize* oleh *The City Mayors Foundation*.<sup>12</sup>

Tidak hanya Bu Risma saja yang mampu menunjukkan akan kualitas kepemimpinannya melalui beberapa penghargaan namun beberapa pemimpin perempuan Indonesia juga mampu

---

<sup>11</sup> Scholastica Gerintya, "*Kuota 30% Perempuan di Parlemen Belum Pernah Tercapai*", diakses pada tanggal 28 September, 2020 pukul 13.00 WIB, <https://tirto.id/cv8q>.

<sup>12</sup> "*Politikus Perempuan Indonesia*", diakses pada tanggal 15 September 2020, pukul 14.30 WIB, <https://gajimu.com/tips-karir/Tentang-wanita/politikus-perempuan-indonesia>

mendapatkan penghargaan atas prestasi dalam kepemimpinannya.

Tahun 2014 dalam kontestasi pilkada di Jombang calon bupati perempuan yaitu Hj. Munjidah Wahab yang merupakan putri langsung salah satu Kyai besar yang ada di Jombang, yaitu KH. Wahab Hasbullah. Sebagaimana Hj. Munjidah Wahab terlahir di tengah keluarga pesantren dimana dominasi laki-laki pastilah sangat kuat namun justru mampu mendobrak budaya pesantren yang kuat akan dominasi laki-laki tersebut dengan berhasil menjadi perempuan yang pertama kalinya memimpin menjadi Wakil Bupati Jombang yang sebagaimana jabatan tersebut didominasi oleh laki-laki.<sup>13</sup>

Terlepas dari berhasilnya calon perempuan pada Pilkada di Jombang pada tahun 2014 silam tersebut tentu masih sering diperlihatkan akan rendahnya keterwakilan perempuan dalam berpolitik. Contoh saja halnya di kabupaten Kudus sendiri sepanjang sejarahnya untuk jabatan bupati belum pernah diemban oleh seorang perempuan namun pernah ada wakil bupati perempuan pada periode 2003-2008 yaitu Noor Haniah.

Tahun 2018, Pilkada dilaksanakan di tiga provinsi yang berada di Pulau Jawa, di antaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pilkada tahun 2018, khususnya di Kabupaten Kudus sendiri ialah satu dari 7 kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah yang tengah mengadakan pemilihan bupati dan wakil bupati yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 yang secara bersamaan terdiri dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Hal itu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kudus dalam pemilihan bupati dan wakil bupati menetapkan ada lima pasangan calon (paslon) yang salah satunya hanya ada satu calon kandidat perempuan yang mencalonkan yaitu Hj. Sri Hartini, S.T inilah yang jarang ditemui pada pilkada kabupaten Kudus pada periode sebelumnya sebagaimana berikut:

---

<sup>13</sup> Atiqotul Maula, "Perempuan dan Politik dalam Kontestasi Pilkada di Jombang." *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol.6, No.1, November 2016.

**Tabel 1.2**

Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kudus Berdasarkan Nomor Urut

Sumber: KPU Kabupaten Kudus

No	Pasangan Calon	Partai Pengusung
1.	Masan, S.E., MM & Drs. H. Noor Yasin, MM	Demokrat PAN Golkar
2.	H. Noor Hartoyo, SH & Junaidi, SH.	Independen
3.	Hj. Sri Hartini, ST & H. Setia Budi Wibowo, S.Ag., MM.	PBB PKS Gerindra
4.	H. Akhwan, S.H & H. Hadi Sucipto, S.Pd., MM.	Independen
5.	Ir. H. Muhammad Tamzil, MT & HM Hartopo, ST, MM, MH.	Hanura PPP PKB

Berdasarkan dari tabel 1.2 menunjukkan bahwa dari kelima daftar pasangan calon bupati dan calon wakil bupati kabupaten kudus menunjukkan bahwa ada satu representasi perempuan yang bertarung dalam pilkada kabupaten Kudus tahun 2018 sementara dalam sejarah kabupaten Kudus belum pernah dipimpin bupati perempuan melainkan hanya pernah memiliki wakil bupati perempuan dari Ir. Muhammad Tamzil yaitu Noor Haniah pada periode 2003-2008. Sehingga ketika pada saat kontestasi dalam Pilkada Kudus tahun 2018 ada salah satu representasi perempuan yang menjadi calon kandidat perempuan hal itulah yang kemudian menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji lebih.

Di dalam Islam perempuan dalam hal kedudukan dipandang dengan posisi yang paling tinggi dan juga dipenuhi dengan keadilan. Berdasar hal tersebut Islam juga memberi derajat dengan kedudukan perempuan sebagai makhluk/manusia

sempurna. Dengan landasan kemanusiannya yang tinggi dari awal terjadi nur dalam Islam yang menyirami bumi, sehingga dalam hal perempuan sebagai wakil rakyat dalam ranah politik akan memiliki harapan yang besar dimana perempuan dapat terlibat langsung dalam pemilihan baik wakil rakyat atau kepala daerah secara langsung.<sup>14</sup>

Pilkada secara langsung (*direct democracy*) yang diselenggarakan sejak tahun 2005 tersebut merupakan suatu bentuk realisasi dari kedaulatan rakyat. Melalui penyelenggaraan Pilkada juga merupakan salah satu bentuk tujuan yang hendak dicapai. Dengan Pilkada langsung menempatkan bahwasanya supremasi berada di tangan rakyat sekaligus menunjukkan adanya peningkatan derajat terkait dengan demokratisasi di Indonesia. Akan tetapi dalam realitanya justru kita disuguhi dengan adanya perilaku-perilaku yang berasal dari banyak pihak yang memang merupakan paradoks dari demokrasi itu sendiri. Terlebih kandidat yang dicalonkan mengupayakan semua cara demi meraih kemenangan, yaitu mulai dari memobilisasi massa, kampanye, bahkan sampai dengan praktik *money politic*/politik uang. Disamping hal itu pun hampir di semua penyelenggaraan Pilkada selama ini tidak terlepas dari adanya isu dan fenomena *money politic*/politik uang.

Adanya penyelenggaraan pilkada hal itu memiliki artian bahwa akan ada partisipasi masyarakat dalam politik semakin luas kesempatannya. Untuk menyikapi dengan tepat kesempatan ini maka pendidikan politik juga penting diperoleh dan dicari masyarakat sehingga dengan demikian kesadaran politik akan timbul yang dapat memberikan dampak positif dalam upaya mewujudkan sistem kepemimpinan di daerah yang baik dan dapat dipercaya oleh rakyat. Terdapat beberapa proses dalam penyelenggaraan pilkada,<sup>15</sup> yaitu : a) penentuan data pemilih; b) pendaftaran dan penetapan pasangan calon; dan c) kampanye.

---

<sup>14</sup> Siti Marlina, "Perempuan Dan Pilkada Dalam Perspektif Kesetaraan Gender Menurut Hukum Islam," *Al-Risalah* 15 No. 1 (2015), <http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/al-risalah/article/view/375>.

<sup>15</sup> Umi Qodarsasi dan Nevy Rusmarina Dewi, "Upaya Peningkatan Elektabilitas Calon Bupati Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018," *Muwazah-Jurnal Kajian Gender* 11 No. 2 (2019), diakses pada tanggal 25 September, 2020 pukul 20.00 WIB, <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/2282>.

Di tingkat lokal pemilihan di Indonesia sangat memiliki keterkaitan dengan adanya peran pemain atau pelaku politik non formal dengan jaringan yang dibentuk. Hingga pada saat ini, hal tersebut menjadi wajar dan lumrah dilakukan dalam pelaksanaan demokrasi lokal, seperti melakukan politik uang yang erat hubungannya dengan peran jaringan tim kampanye dan tim suksesnya yang dibentuk para kandidat. Hal ini juga termasuk dengan adanya kemunculan *botoh* pada pelaksanaan pilkada langsung yang disini sangat penting perannya dalam upaya kemenangan kandidat. Meski pada faktanya yang mendasari adanya *botoh* ialah karena hanya seperti permainan judi namun hal ini juga diyakini sebagai faktor penentu kemenangan karena sepak terjang yang dilalui *botoh* itu sendiri. Dari peran dan tujuan *botoh* tersebut sekarang tidak lagi menjadi tabu untuk dijadikan sebagai bahan perbincangan. Dalam bahasa Jawa yang disebut *botoh* ialah “pejudi” kemudian dalam KBBI, mempunyai kekuatan politik yang tak bisa dinafikan dan hal tersebut pun sangatlah merusak dari esensi proses demokrasi.<sup>16</sup>

Dari informasi data sensus BPS kabupaten Kudus untuk tahun 2016<sup>17</sup>, didapatkan jumlah penduduk Kabupaten Kudus pada tahun 2016 sebesar 841.499 jiwa. Data menunjukkan kelompok laki-laki dan perempuan dengan masing-masing berjumlah 414.315 jiwa laki-laki (49,24 persen) dan 427.184 jiwa perempuan (50,76 persen). Hal tersebut menunjukkan adanya perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dengan nilai 96,99 dimana ini menggambarkan pada tiap 100 penduduk perempuan terdapat 97 penduduk laki-laki. Melalui data tersebut bisa disimpulkan bahwasanya jumlah perempuan lebih besar dibanding laki-laki yang berada di kabupaten Kudus. Akan tetapi hal itu tidak sebanding lurus pada saat pilkada kabupaten Kudus 2018 manakala ada salah satu calon kandidat perempuan yang mencalonkan dirinya mengikuti kontestasi Pilkada tahun 2018 yaitu Hj. Sri Hartini, S.T yang berpasangan dengan H. Setia Budi Wibowo, S.Ag., MM. dengan diusung oleh tiga parpol yaitu

---

<sup>16</sup>Umi Qodarsasi dan Nevy Rusmarina Dewi, “Upaya Peningkatan Elektabilitas Calon Bupati Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018,” *Muwazah-Jurnal Kajian Gender* 11 No. 2 (2019), diakses pada tanggal 25 September, 2020 pukul 21.00 WIB, <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/2282>.

<sup>17</sup>BPS Kabupaten Kudus Tahun 2016, diakses pada tanggal 25 September, 2020 pukul 21.15 WIB.

PBB, PKS, dan Gerindra. Hal tersebut menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji dikarenakan kegagalannya dipengaruhi oleh adanya praktik *money politic*, kurangnya pemahaman politik, adanya fenomena *botoh* yang juga memengaruhi tingkat elektabilitas pada pilkada di kabupaten Kudus tahun 2018.

Ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya calon bupati perempuan pada pilkada kabupaten Kudus 2018 dan bagaimana cara penyelesaian dari kegagalan tersebut. Sehingga peneliti mengajukan penelitian dengan judul: **“Strategi Politik Calon Bupati Perempuan pada Pilkada Kudus (Kota Santri) Tahun 2018.”**

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada analisis hasil pemilu pada Pilkada Kudus (Kota Santri) Tahun 2018 yang menunjukkan adanya faktor-faktor ketidakberhasilan dari calon bupati perempuan.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian yang telah dipaparkan di atas berdasarkan dari fakta yang terangkum maka peneliti ingin mengetahui:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pilkada di Kudus Kota Santri dengan Partisipasi Calon Perempuan Tahun 2018?
2. Bagaimana Respon dari Partai dan Pemilih tentang Partisipasi Calon Bupati Perempuan?
3. Bagaimana Hasil Pemilu di Kota Santri dengan Partisipasi Calon Bupati Perempuan pada Tahun 2018?

## **D. Tujuan Masalah**

Adapun dari rumusan masalah yang akan peneliti lakukan di atas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan penelitian yaitu:

1. Menganalisis pelaksanaan Pilkada Kudus tahun 2018 dengan partisipasi calon bupati perempuan.
2. Mengidentifikasi serta menganalisis tentang respon dari partai dan masyarakat pada partisipasi calon bupati perempuan.
3. Mengidentifikasi serta menganalisis hasil pemilu tentang hasil yang menunjukkan faktor-faktor penyebab ketidakberhasilan calon bupati perempuan pada Pilkada Kudus tahun 2018 dengan memberikan formulasi.

## E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dilakukannya penelitian ini, maka diharapkan hasil tulisan dari penelitian ini dapat memberikan sebuah gambaran terkait dengan strategi calon bupati perempuan di daerah santri pada pilkada kudus 2018. Sebagaimana dengan adanya penulisan penelitian mengenai pilkada Kudus 2018 ini mampu memberikan sebuah acuan guna mengetahui tentang apa saja Faktor-faktor Ketidakberhasilan Calon Bupati Perempuan di Daerah Santri pada Pilkada Kudus 2018.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan akan manfaat baik itu bagi pihak-pihak terkait atau pun bahkan bagi yang memiliki minat dalam mengkaji terkait calon bupati perempuan dalam pilkada di daerah santri, yaitu:

### 1. Secara Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Penelitian secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi wacana serta mengembangkan akan khasanah ilmu pengetahuan terutama mengenai persoalan gender dalam masyarakat yang dihubungkan dengan keterwakilan perempuan dalam ranah politik.
- b. Mampu dijadikan sebagai suatu bahan yang digunakan untuk melakukan kajian lanjutan terutama mengenai calon pemimpin perempuan dalam proses sosialisasi yang nantinya dapat menjadi khasanah dalam kepustakaan.
- c. Mampu dijadikan sebagai bahan untuk memperkaya referensi terutama persoalan pemimpin perempuan dalam ranah politik.

### 2. Secara Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik itu bagi peneliti, instansi, maupun yang lainnya terutama dalam mengetahui terkait dengan strategi politik dan suksesi kepemimpinan yang dilakukan oleh calon bupati perempuan pada pilkada kudus tahun 2018.
- b. Mampu memberikan akan gambaran sebuah kajian isu kesetaraan gender, aktor-aktor dalam pilkada, strategi politik, suksesi kepemimpinan, faktor penyebab ketidakberhasilan calon bupati perempuan khususnya di pilkada kudus tahun 2018, dan lain sebagainya.

- c. Sebagai sumber rujukan bagi peneliti yang tengah melakukan penelitian mengenai pilkada khususnya di Kota Santri.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mendapatkan berbagai gambaran sekaligus garis-garis dari masing-masing bagian maupun yang saling berhubungan atau bersangkutan yang sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut ini ialah sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun sebagaimana berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II : Kerangka Teori**

Bab ini berisi uraian konsep mengenai definisi yang berkaitan dengan judul penelitian, yang meliputi aspek pemilihan kepala daerah kabupaten kudus tahun 2018, strategi yang dilakukan calon bupati perempuan di daerah santri.

### **BAB III : Metode Penelitian**

Bab ini berisi mengenai: Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Setting Penelitian, Subjek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Keabsahan Data dan Teknik Analisis Data.

### **BAB IV : Hasil Dan Analisis Penelitian**

Bab ini berisi tentang latar belakang dan pembahasan terkait dengan Strategi Politik Calon Bupati Perempuan pada Pilkada Kudus (Kota Santri) Tahun 2018.

### **BAB V : Penutup**

Bab ini terdiri dari simpulan dan saran.